

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang terus menjadi tantangan besar. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, rendahnya upah di sektor informal, kurangnya infrastruktur di pedesaan, serta ketimpangan distribusi kekayaan merupakan gambaran umum kemiskinan di Indonesia. Upaya penghapusan kemiskinan telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk percepatan penghapusan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang dilakukan dengan: (a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berkaitan dengan strategi pemerintah yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah telah berupaya menghapus kemiskinan melalui tiga strategi utama, yaitu (a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan menyediakan subsidi, akses kesehatan, dan pendidikan gratis; (b) peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah; serta (c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan mengembangkan infrastruktur di daerah tertinggal, memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat yang

membutuhkan. Pemerintah juga berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dan program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi di daerah pedesaan menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan digital, yang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Upaya ini juga dilengkapi dengan kebijakan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan target dan memberikan dampak positif yang nyata. Dari sekian banyaknya program penghapusan kemiskinan, PKH merupakan salah satu program penghapusan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tidak hanya memberikan bantuan berupa uang atau barang saja, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan bagi KPM dan mengajak KPM untuk lebih memperhatikan soal pendidikan serta kesehatan keluarganya.

Sejak mulai diterapkan, PKH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terus berinovasi sehingga mengalami banyak perkembangan. Tujuan kebijakan PKH tidak hanya untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu lancarnya penyaluran bantuan sosial, tetapi juga untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan anggota KPM PKH yang dapat mandiri dan tidak lagi ketergantungan akan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini bukan hanya karena mereka tidak memenuhi syarat keanggotaan, tetapi juga karena mereka mampu bertahan secara ekonomi dengan kemampuan sendiri.

Definisi kemandirian menurut Abudin Nata (dalam Zulkhaidri dan Zahid, M 2021:130) adalah sikap yang terkait dengan kemampuan untuk membuat pilihan, mengungkapkan ide dan pandangan, memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Lalu, dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, kemandirian adalah kemampuan Keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada Keluarga lain.

PKH yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatannya, melalui berbagai macam bantuan yang ada di dalamnya. Walaupun PKH memiliki tujuan yang positif untuk mengurangi kemiskinan penerimanya, tetapi pada pelaksanaannya PKH mengalami berbagai macam hambatan atau pun masalah, seperti ketidakmerataan dalam pemberian bantuan yang dikarenakan data dari pusat yang sulit diubah. Rendahnya partisipasi dan tingkat pemahaman KPM terhadap PKH, salah satu bentuknya yaitu malas untuk memeriksakan kesehatan dan imunisasi bagi balitanya, serta malas mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), padahal kegiatan P2K2 ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku KPM ke arah yang lebih baik lagi. Kurangnya kesadaran diri KPM untuk graduasi, karena tujuan dari PKH

itu sendiri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan KPM serta mampu bertahan secara ekonomi dengan kemampuan sendiri, bukan dengan bergantung pada bantuan dari pemerintah. Komunikasi antara pendamping PKH belum berjalan dengan lancar, sehingga dalam pelaksanaan PKH terdapat kendala dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia jumlah penerima PKH di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan PKH mengalami kenaikan sebanyak 40.993 KPM. Kemudian naik kembali pada tahun 2021 sebanyak 44.742 KPM. Selanjutnya, pada tahun 2022 kembali naik sebanyak 3.132 KPM. Di Jawa Barat sendiri pada tahun 2023 tercatat ada 1.504.753 KPM PKH (Diskominfo Jabar, 2024). Di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 tercatat ada 9.073 KPM yang menerima bantuan PKH (Diskominfo Jabar, 2024). Di Desa Cikondang, yang terletak di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi PKH sebagai bentuk upaya dalam mengatasi kemiskinan. Berdasarkan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Cikondang tercatat per Februari 2024 ada 424 KPM PKH

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 sebanyak 1.179.304 KPM PKH telah menyatakan keluar dari kepesertaan PKH. Dari total KPM graduasi tersebut, Kemensos mencatat ada dua jenis graduasi yang terjadi di PKH pada tahun 2020 yaitu graduasi secara mandiri sebanyak 341.773 KPM dan graduasi secara alamiah sebanyak 837.531 KPM. Dalam berita Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020, di tahun 2021 Kementerian

Sosial Republik Indonesia mewacanakan peningkatan target graduasi KPM PKH dari 10% di tahun 2020 menjadi 30% pada tahun 2021, yang mana apabila dilihat dari jumlah KPM PKH tahun 2021 pada penjelasan sebelumnya, sebanyak 3.025.720 KPM PKH graduasi. Pada tahun 2022 (dalam Beritasatu.com, 2023) "Per hari ini (Sabtu) pemerima PENA yang sudah keluar (dari PKH), sebanyak 1876 orang dari 5209 yang menerima bantuan di seluruh Indonesia. Mereka memilih berhenti menerima bansos secara sukarela. Namun kita akan tetap monitoring selama mereka usaha mandiri," kata Mensos. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Kasie Kesos Desa Cikondang, selama empat tahun ini (2020 – 2023) belum ada satu pun KPM PKH Desa Cikondang yang graduasi mandiri.

Program graduasi mandiri merupakan sebuah indikator keberhasilan dari Pogram Keluarga Harapan (PKH), sejak dimuali pada tahun 2007 hingga saat ini sudah banyak KPM yang mengalami graduasi, baik itu graduasi secara mandiri maupun graduasi secara alamiah. Keberhasilan graduasi PKH terjadi di beberapa daerah, diantaranya yaitu di Kota Depok, Kota Magelang, dan Kabupaten Sumedang. Pada bulan Oktober 2023 (Berita Depok, 2023) belasan KPM PKH diberikan sertifikat graduasi oleh Wakil Wali Kota Depok. Wakil Wali Kota Depok mengatakan keberhasilan KPM bisa graduasi ini tidak lepas dari adanya peran pendamping PKH yang sudah berupaya melakukan pendampingan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan bisa berpenghasilan lebih dengan memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Wakil Wali Kota Depok juga menambahkan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi,

pihaknya terus berupaya melalui program wirausaha baru, pelatihan tenaga kerja, maupun pemberian beasiswa. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Magelang (Dinas Sosial Kota Magelang, 2023) menyatakan terdapat 261 KPM PKH di Kota Magelang Graduasi Sejahtera. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang mengapresiasi peran pendamping PKH dalam mendorong proses graduasi sejahtera mandiri KPM PKH di Kota Magelang. Momentum graduasi sejahtera merupakan titik awal keberlanjutan pemberdayaan keluarga untuk lebih mandiri dalam meningkatkan taraf hidup. Proses pemberian edukasi dan informasi kepada KPM PKH baik melalui pertemuan kelompok maupun pendampingan kewirausahaan sosial perlu terus ditingkatkan oleh pendamping PKH. Pada tahun 2021 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021) di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Cibungur terdapat KPM PKH dengan keanggotaan PKH selama 10 tahun yang mengalami graduasi secara alami. KPM tersebut mampu memanfaatkan bantuan PKH sebaik mungkin untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga salah satunya berhasil menjadi guru. KPM PKH tersebut bersyukur bisa graduasi secara alami, bahkan mengajak penerima lainya bergantian agar bisa merasakan bantuan dan jangan hanya itu saja penerima bantuan PKH.

Kondisi kemandirian masyarakat Desa Cikondang sebelum adanya PKH tidak begitu ada perubahan yang signifikan setelah adanya bantuan PKH antara lain, pada aspek emosi KPM merasa didukung dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan, sehingga mampu mengelola emosi dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih rasional, namun bantuan dari PKH tidak sepenuhnya membantu KPM mengatasi permasalahan emosi yang dialaminya.

Masih terdapat anggota KPM yang mengalami tekanan psikologis dan emosional yang tinggi, merasa terisolasi, dan kurang memiliki harapan untuk masa depan, yang salah satunya disebabkan oleh kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Pada aspek ekonomi KPM jadi lebih mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, memulai usaha kecil, dan meningkatkan pendapatan keluarga, namun hal ini tidak berlaku pada seluruh KPM, ada yang masih takut untuk memulai usaha dan ada juga yang merasa bantuan tunai dari PKH ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka memutuskan untuk bergantung pada bank emok maupun perkreditan lainnya. Dari aspek intelektual setelah adanya PKH KPM dapat menyekolahkan anak-anak mereka dengan lebih baik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan, serta mengakses sumber daya pendidikan lainnya, tetapi terdapat beberapa kasus yang bahkan KPM sudah menerima bantuan PKH tetapi anaknya tidak mau sekolah dan KPM tidak mau mengikuti program pelatihan maupun pendidikan yang disediakan oleh PKH. Yang terakhir, dari aspek sosialnya PKH membantu penerimanya menjadi lebih aktif dalam komunitas, membangun hubungan yang lebih baik dengan tetangga, dan terlibat dalam kegiatan sosial dan gotong royong, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang malas terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Penelitian tentang pengaruh PKH terhadap kemandirian KPM penting untuk pelaksanaan tujuan dari PKH itu sendiri yaitu, mengatasi kemiskinan dengan menciptakan KPM PKH yang mandiri dan tidak lagi ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya di Desa Cikondang. Penelitian

ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai pelaksanaan PKH di Desa Cikondang terhadap pengaruhnya kepada aspek-aspek kemandirian, serta dari hasil wawancara dan observasi sementara dengan kasi kesos serta kepala desa di Desa Cikondang yang mengatakan bahwa PKH di Desa Cikondang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penerimanya. Namun, tidak hanya manfaat yang didapat dari PKH di Desa Cikondang ini, ada beberapa masalah yang terjadi akibat pelaksanaan PKH ini, diantaranya adalah, membuat KPM ketergantungan terhadap bantuan tersebut dan merasa bangga, hingga mereka berpikir bantuan PKH ini merupakan gaji yang pantas mereka dapatkan, kurangnya kesadaran diri KPM yang sudah mampu untuk graduasi, serta pembaharuan data yang memakan proses cukup lama. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang”, dengan dua variabel penelitian yaitu, variabel bebasnya merupakan PKH dan variabel terikatnya merupakan kemandirian, dimana peneliti mengangkat empat aspek kemandirian menurut Havighurst (dalam Endriani, A. Ivan, A. Ade, S, 2020:13), yaitu aspek emosi, aspek intelektual, aspek ekonomi, dan aspek sosial untuk mengetahui apakah PKH di Desa Cikondang memengaruhi kemandirian KPM ataukah tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana Pengaruh PKH, Terhadap Kemandirian KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang”. Dari rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana pengaruh PKH terhadap kondisi emosi KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana pengaruh PKH terhadap kondisi ekonomi KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana pengaruh PKH terhadap kondisi intelektual KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang?
5. Bagaimana pengaruh PKH terhadap kondisi sosial KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengukur terkait, “Pengaruh PKH, Terhadap Kemandirian KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang”. Secara khusus, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik responden.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh PKH terhadap kondisi emosi KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh PKH terhadap kondisi ekonomi KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh PKH terhadap kondisi intelektual KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
5. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh PKH terhadap kondisi sosial KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ide dan pemikiran untuk pengembangan teori dan konsep kesejahteraan sosial mengenai pengaruh pelaksanaan PKH terhadap kemandirian KPM. Khususnya untuk Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan yang perlu memahami bahwa orang miskin itu berdaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan PKH terhadap kemandirian KPM di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan peneliti dalam menyusun laporan penelitian sebagaimana tercantum dalam buku pedoman penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang tinjauan penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian, tinjauan konseptual yang relevan dengan judul penelitian, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA, memuat tentang sumber referensi dan rujukan yang digunakan dalam penelitian skripsi